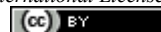


Efek Moderasi Kapasitas SDM Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan pada OPD Kota Palu

Astrialestari^{1*}, Rudy Usman², Masruddin³, Andi Mattulada Amir⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tadulako, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 06 February 26
Final Revision: 17 March 26
Accepted: 07 April 26
Online Publication: 30 June 26

KEYWORDS

Utilization of Information Technology, Regional Financial Accountability, Human Resource Capacity, Regional Government Organizations, Regional Governments

KATA KUNCI

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, OPD, Pemerintah Daerah

CORRESPONDING AUTHOR

astrialestari0604@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i3.402

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of information technology utilization on regional financial accountability and to examine the moderating effect of human resource capacity in this relationship. The study was conducted in 30 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Palu City, involving 60 respondents consisting of regional financial management officials. A quantitative approach was used through a survey method with purposive sampling. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using IBM SPSS Statistics version 25. The results showed that the use of information technology had a positive and significant effect on regional financial accountability, as did human resource capacity. However, the results of the moderation analysis showed that human resource capacity did not act as a moderating variable in the relationship between the use of information technology and regional financial accountability. These findings indicate that both variables function as independent factors that directly affect regional financial accountability. This study is expected to contribute theoretically to the development of public sector accounting studies and provide practical considerations for local governments in improving financial management accountability through the optimization of information technology and the enhancement of human resource capacity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah serta menguji efek moderasi kapasitas sumber daya manusia dalam hubungan tersebut. Penelitian dilakukan di 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu, dengan melibatkan 60 responden yang terdiri dari aparatur pengelola keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode survei dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, demikian juga kapasitas sumber daya manusia yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut berfungsi sebagai faktor independen yang secara langsung memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tiang utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) [1]. Keberhasilan suatu instansi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya serta sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan [2]. Pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis teknologi

informasi dapat mempercepat pencatatan, pelaporan, dan pengawasan, sehingga informasi keuangan menjadi lebih akurat dan mudah diakses [3]. Namun, peran SDM yang kompeten tetap menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dijalankan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan dukungan penting dalam mempercepat penyajian data, meminimalkan kesalahan, serta memperluas akses informasi publik secara transparan. Kualitas SDM

berpengaruh besar terhadap efektivitas pengelolaan keuangan publik, sementara teknologi informasi mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui penyediaan informasi secara cepat, terbuka, dan efisien [4]. Seiring dengan berkembangnya akuntansi sektor publik, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah semakin meningkat. Masyarakat mengharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur, sah, dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Akuntansi sektor publik berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui penyediaan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Hal ini menegaskan pentingnya sistem informasi yang baik serta SDM yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Laporan keuangan pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban harus disusun secara tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama beberapa tahun terakhir. Yang menunjukkan kondisi akuntabilitas keuangan di Kota Palu memberikan hasil yang positif. Namun, meskipun opini WTP mencerminkan akuntabilitas yang baik, hal ini tidak menjamin bebasnya penyimpangan, mengingat BPK masih menemukan kelemahan dalam pengelolaan aset, belanja modal, rekonsiliasi antar perangkat daerah yang belum optimal, serta sistem pengendalian intern yang perlu diperbaiki. Selain itu, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem dan prosedur keuangan daerah telah berjalan dengan baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Menurut teori *Good Governance*, teknologi informasi memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Informasi yang dihasilkan memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, baik dalam konteks individu, organisasi bisnis, maupun pemerintahan [5]. Penerapan sistem informasi keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD), dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan keterlacakan (*traceability*) atas setiap transaksi keuangan.

Akuntabilitas keuangan daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pengelolaan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung prinsip akuntabilitas tersebut dengan menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan [6]. Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas serta kualitas pelaporan keuangan di sektor publik [7], [8], [9].

H1: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Selain dukungan teknologi, kapasitas (SDM) juga memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah [10]. Kapasitas SDM mencerminkan tingkat pendidikan, kompetensi, pengalaman, serta pemahaman aparatur terhadap regulasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurut teori Human Capital, investasi dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. SDM yang kompeten akan mampu mengelola anggaran, menyusun laporan keuangan, serta mematuhi standar akuntansi pemerintahan dengan lebih baik.

Dalam organisasi sektor publik, kualitas kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu yang menjalankan fungsi administratif dan teknis [11]. Dalam konteks keuangan daerah, aparatur yang memiliki kapasitas memadai cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah [12], [13].

H2: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa didukung oleh kapasitas SDM yang memadai. Teknologi informasi bersifat sebagai alat (*tools*), sehingga efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam mengoperasikan, memahami, dan memanfaatkan sistem tersebut. Aparatur dengan kapasitas SDM yang tinggi akan lebih mampu mengintegrasikan teknologi informasi secara lebih efektif dalam proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah [14].

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan dan pemanfaatan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan, yang sangat berkaitan dengan kompetensi pengguna. Sejalan dengan teori tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpotensi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas maupun akuntabilitas laporan keuangan pemerintah [15], [16]. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan daerah.

H3: Kapasitas sumber daya manusia memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, khususnya pada perangkat daerah (OPD). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji pemanfaatan teknologi informasi atau kapasitas SDM secara terpisah dan banyak dilakukan pada unit pemerintahan skala kecil seperti desa, kajian ini memberikan perspektif yang lebih luas dengan mengintegrasikan kedua variabel tersebut secara simultan. Pendekatan ini semakin penting mengingat masih adanya kesenjangan antara capaian formal berupa opini WTP yang diterima pemerintah daerah dan berbagai kendala teknis pengelolaan keuangan yang terjadi di tingkat OPD, sehingga diperlukan analisis yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar penggunaan teknologi informasi memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana kapasitas sumber daya manusia berfungsi sebagai variabel moderasi. Sebagai variabel moderasi, kapasitas SDM diharapkan tidak hanya menjadi faktor penunjang, tetapi dapat mengubah kekuatan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan kapasitas yang tinggi, SDM yang lebih terampil dan berpengetahuan mampu memaksimalkan potensi teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Sebaliknya, dengan kapasitas yang rendah, meskipun teknologi informasi telah diterapkan, pengelolaan keuangan daerah tidak akan optimal, dan akuntabilitas keuangan pun akan terhambat. Maka dari itu, analisis moderasi dalam penelitian ini tidak hanya untuk mengukur pentingnya SDM, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana kapasitas SDM dapat memperkuat atau bahkan memperlemah dampak dari pemanfaatan teknologi

informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menggunakan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data untuk menganalisis suatu populasi atau sampel. Teknik statistik kemudian digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Hipotesis yang dikembangkan diuji menggunakan data yang telah diolah, yang disajikan dalam bentuk numerik [17]. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi (X), kapasitas sumber daya manusia (Z), dan akuntabilitas keuangan daerah (Y) yang diteliti pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh dari data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*, dengan pertimbangan kriteria khusus bahwa responden meliputi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan aparatur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di 30 OPD Kota Palu dan Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang.

IBM SPSS Statistics Versi 25 digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Tahapan analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji peran kapasitas SDM sebagai variabel moderasi. Sebelum dilakukan analisis moderasi, dilakukan proses *mean centering* pada variabel independen dan variabel moderator untuk mengurangi potensi multikolinearitas dan meningkatkan keakuratan estimasi model [18].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Mengacu pada hasil distribusi kuesioner yang diberikan kepada 60 orang responden, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran menyeluruh terkait karakteristik setiap variabel yang diteliti. Temuan statistik menunjukkan adanya perbedaan variasi nilai di antara variabel pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas keuangan daerah, dan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. deviation
PTI	60	3,47	5,00	4,3152	0,35701
AKD	60	3,87	5,00	4,4315	0,38145
KSDM	60	3,54	5,00	4,2275	0,39887

Berdasarkan hasil statistik deskriptif Tabel 1, nilai rata-rata pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pada OPD Kota Palu berada pada kategori yang relatif baik. Variabel kapasitas SDM juga menunjukkan nilai rata-rata yang cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa aparatur keuangan memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sementara itu, akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan nilai rata-rata yang mencerminkan bahwa pelaporan keuangan telah dilakukan secara cukup akuntabel.

Pada tabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI), hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan TI memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3152 dengan standar deviasi 0,35701. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada OPD Kota Palu tergolong tinggi, serta memiliki tingkat penyebaran data yang relatif rendah, sehingga jawaban responden cenderung homogen.

Ada nilai rata-rata 4,4315 untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah (AKD) dan standar deviasinya 0,38145. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan daerah pada OPD Kota Palu berada pada kategori tinggi, yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang relatif akuntabel dan konsisten antar responden. Selain itu, variabel kapasitas SDM, dengan nilai rata-rata 4,2275 dan standar deviasi 0,39887, yang menunjukkan bahwa aparatur yang bertugas di bagian keuangan OPD Kota Palu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel studi memiliki nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai tengah skala, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta akuntabilitas keuangan daerah. Setelah karakteristik data penelitian teridentifikasi melalui analisis statistik deskriptif, data atau variabel tersebut dapat dinilai validitasnya karena semakin besar standar deviasinya, maka semakin beragam data yang diperoleh.

3.2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen

3.2.1. Uji Validitas

Temuan dari pengujian validitas terhadap 43 item pernyataan seperti yang terlihat pada Tabel 2 mengungkapkan bahwa setiap item pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan koefisien korelasi yang melebihi nilai R Tabel, yakni di atas 0,254. Dengan

demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua alat ukur yang diterapkan dalam penelitian ini telah memenuhi standar validitas dan dapat dipercaya untuk menilai variabel-variabel yang sedang diteliti. Koefisien korelasi yang diperoleh untuk masing-masing item berkisar antara 0,468 sampai 0,856, yang menandakan bahwa setiap elemen pada variabel pemanfaatan TI, Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Kapasitas SDM dapat diandalkan untuk mengukur aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari itu, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sah dan cocok untuk diterapkan dalam pengumpulan data untuk analisis selanjutnya. Validitas ini juga menjamin bahwa temuan penelitian yang diperoleh secara tepat menggambarkan fenomena yang ingin dikaji, yaitu keterkaitan antara informasi teknologi, kapasitas SDM, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 2. Uji validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r- hitung	Keterangan
Pemanfaatan TI (X)	15	0,650 – 0,810	Valid
Akuntabilitas (Y)	15	0,710 – 0,845	Valid
Kapasitas SDM (Z)	13	0,680 – 0,790	Valid

3.2.2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar dari 0,70, yang mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) adalah 0,900, untuk variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah (AKD) adalah 0,937, dan untuk variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah 0,890. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik, yang berarti instrumen penelitian ini dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

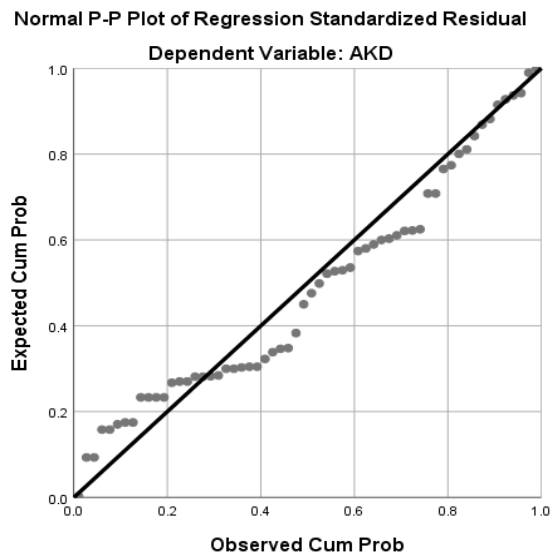
Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X (PTI)	0,900	Reliabel
Y (AKD)	0,937	Reliabel
Z (KSDM)	0,890	Reliabel

3.3. Uji Asumsi Klasik

3.3.1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov–Smirnov menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,024 di bawah 0,05. Meskipun demikian, mengingat ukuran sampel yang

cukup besar (60 responden), analisis regresi tetap dapat dilakukan karena sesuai dengan prinsip Teorema Limit Sentral, yang menyatakan bahwa dengan sampel besar, distribusi data residual cenderung mendekati normal, meskipun hasil uji normalitas tidak memenuhi kriteria [19].



Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Titik-titik residual terdistribusi mendekati garis lurus, seperti yang ditunjukkan oleh grafik Normal P-P Plot Regression Standardized Residual pada Gambar 1. Hal ini mendukung temuan bahwa meskipun uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan ketidaksesuaian normalitas, grafik tersebut memperlihatkan bahwa distribusi residual tidak menunjukkan penyimpangan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual cukup normal untuk dilanjutkan dengan analisis regresi lebih lanjut.

3.3.2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM) memiliki nilai masing-masing 1,451 Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance 0,689 > 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

3.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar (Sig. 0,969) dan kapasitas sumber daya manusia sebesar (Sig 0,367), yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga model regresi dan MRA layak digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

3.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan metode yang diterapkan untuk mengungkap hubungan ketergantungan antara satu variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Dengan demikian, teknik ini diterapkan dalam studi yang melibatkan dua variabel bebas atau lebih [20]. Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linear berganda dengan Model Persamaan (1).

$$Y = 4.432 + 642Xc + 314Zc + \varepsilon \quad (1)$$

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	koefisien	Std.Error	t	Sig.
konstanta	4,432	0,028	158,528	0,000
Xc	0,642	0,095	6,752	0,000
Zc	0,314	0,085	3,687	0,001

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada Model 1, pemanfaatan teknologi informasi (Xc) memperoleh koefisien regresi sebesar 0,642 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Yang di mana menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi pada OPD, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas keuangan daerah yang dihasilkan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (Zc) memperoleh koefisien regresi sebesar 0,314 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan, kompetensi, dan pemahaman aparatur di bidang keuangan berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari analisis koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai R sebesar 0,830 dan Adjusted R Square sebesar 0,678. Dari sini dapat disimpulkan sebesar 67,8% variasi akuntabilitas keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan sisanya sebesar 32,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan nilai F sebesar 63,050 dengan signifikansi 0,000 (<0,05). Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dan kemampuan sumber daya manusia secara simultan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (Xc) berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dimana memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,642 dan signifikansi 0,000 (<0,05). Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (Zc) memiliki koefisien regresi sebesar 0,314 dan signifikansi 0,001 (<0,05), menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

3.3.5. Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis adalah perluasan khusus dari regresi linier berganda yang melibatkan penyertaan istilah interaksi. Teknik ini membantu peneliti memahami bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berubah tergantung pada tingkat variabel moderator. Dengan memeriksa interaksi ini, teknik ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan kompleks dalam data [20].

Tabel 5. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	koefisien	Std.Error	t	Sig.
konstanta	4,439	0,033	133,678	0,000
Xc	0,636	0,097	6,590	0,000
Zc	0,331	0,094	3,524	0,001
XZ	-0,102	0,226	-0,450	0,655

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada Tabel 5, didapatkan Model Persamaan (2) sebagai berikut.

$$Y = 4.439 + 636Xc + 331Zc - 102(X \times Z) + \varepsilon \quad (2)$$

Hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada Model 2 pemanfaatan teknologi informasi (Xc) menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,636 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah, semakin optimal pemanfaatan TI, maka semakin meningkat akuntabilitas keuangan daerah, dengan asumsi variabel lain konstan. Kapasitas sumber daya manusia (Zc) memiliki koefisien regresi sebesar 0,331 dengan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$) yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya, variabel interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia ($X \times Z$) memiliki koefisien regresi sebesar -0,102 dengan nilai signifikansi sebesar 0,655 ($> 0,05$).

Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan kata lain, kapasitas sumber daya manusia tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah, melainkan berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah secara langsung.

Hasil pengujian Model 2 menunjukkan nilai R sebesar 0,831 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,673. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 67,3% variasi akuntabilitas keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, dan interaksi antara keduanya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Didapatkan nilai F adalah 41,512, dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$).

Menurut hasil tes F, menunjukkan bahwa model regresi yang melibatkan kapasitas SDM, pemanfaatan TI, dan interaksi keduanya dapat digunakan dan berdampak pada akuntabilitas keuangan daerah secara simultan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (Xc) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Kapasitas sumber daya manusia (Zc) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Namun, variabel interaksi ($Xc \times Zc$) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,102 dengan signifikansi 0,655 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak terbukti memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sementara itu, hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut berfungsi sebagai faktor independen yang secara langsung memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

3.4. Pembahasan

3.4.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil dari akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi pemanfaatan teknologi informasi memberikan nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai signifikan tersebut $< 0,05$, sehingga pemanfaatan TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah, maka semakin meningkat pula akuntabilitas yang dihasilkan.

Teknologi informasi memegang peran penting dalam mendukung kecepatan pemrosesan data, ketepatan penyajian laporan keuangan, serta transparansi informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kajian ini mengonfirmasi teori *Good Governance* yang menyoroti pentingnya sistem informasi yang andal untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan keandalan informasi keuangan.

Temuan ini mendukung hasil kajian sebelumnya yang menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [7], [8], [9]. Kajian lain juga menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah [21]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

3.4.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dan nilai signifikan kurang dari 0,05, H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, pemahaman, serta kemampuan teknis yang memadai di bidang keuangan akan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara lebih akuntabel. Kapasitas sumber daya manusia mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih memahami regulasi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, serta prosedur pelaporan keuangan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian ini mengkonfirmasi teori Human Capital, yang berpendapat bahwa kualitas SDM adalah aset utama dalam peningkatan kinerja organisasi. Hasil ini juga konsisten dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kapasitas SDM memegang peran penting dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah [12], [13]. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.4.3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia tetap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun, variabel interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,655 dimana $>0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, H3 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas sumber

daya manusia tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tidak signifikannya peran moderasi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia secara individual berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, keduanya tidak terbukti memperkuat dalam hubungan tersebut.

Hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa kompetensi pengguna dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi tetap berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah tanpa harus dipengaruhi oleh tingkat kapasitas sumber daya manusia. Salah satu kemungkinan penyebab tidak signifikannya efek moderasi adalah bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan telah dirancang cukup sederhana dan terstandarisasi, sehingga dapat digunakan oleh aparatur dengan tingkat kapasitas yang relatif beragam.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun teknologi informasi dapat diakses dengan mudah, tantangan terletak pada peningkatan kualitas penggunaan teknologi oleh sumber daya manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya gap keterampilan dalam hal penggunaan teknologi informasi secara strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas. Kurangnya pelatihan lanjutan atau integrasi antara sistem teknologi informasi dan proses kerja SDM juga berpotensi mengurangi sinergi antara kedua variabel tersebut. Salah satu kemungkinan lainnya adalah kurangnya kesadaran akan potensi manfaat teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, yang dapat mengurangi komitmen sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penggunaannya. Data ini sejalan dengan beberapa kajian sebelumnya yang menemukan bahwa variabel kapasitas SDM tidak selalu berperan sebagai moderator, melainkan lebih berfungsi sebagai variabel independen yang berdiri sendiri [21], [22].

4. Kesimpulan

Pemanfaatan kapasitas SDM dan teknologi informasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa kedua komponen ini memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, tidak ada bukti bahwa kapasitas SDM dapat mengontrol dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas SDM memiliki pengaruh yang lebih besar sebagai komponen independen yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan regional secara langsung. Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan salah satunya adalah penggunaan data persepsi dan cakupannya yang terbatas. Akibatnya, diharapkan bahwa penelitian

selanjutnya akan memperluas subjek penelitian dan memasukkan variabel tambahan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komponen-komponen yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan regional.

Daftar Rujukan

- [1] Hadis, F. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 106–120. <https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.202>
- [2] Fauziah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang). *Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209.
- [3] Irvan, N., Mus, A. R., Su'un, M., & Sufri, M. (2017). Effect of Human Resource Competencies, Information Technology and Internal Control Systems on Good Governance and Local Government Financial Management Performance. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences (ISSN 2455-2267)*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.21013/jmss.v8.n1.p4>
- [4] Pratolo, S., & Fadilah, A. G. (2022). The Effects of Human Resources and Information Technology Utilization toward Transparency of Village Financial Management with Organizational Commitment as a Moderated Variable (Empirical Study in Bantul Regency). *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021)*, 201. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.038>
- [5] Mardinan, T., Dahlan, M., & Fitriyah, F. K. (2018). Effect of Human Resources, Leadership Style, The Use of Information Technology and Internal Control on the Quality of Financial Statements (Study at Directorate General of Construction, Ministry of Works and Public Housing). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i1.18795>
- [6] Usman, R., Ibrahim, A. I., Maulana, R. B., & Safitri, N. (2026). The Application of E-SAKIP According to Employees 'Perspectives in Preparing Performance Accountability Reports : A Case Study at the City of Palu' s Department of Public Works and Housing. 8(1), 387–393.
- [7] Indraswari N. E., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1).
- [8] Kardina, M., Frinaldi, A., Eka Putri, N., & Magister Administrasi Publik, P. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 615–620.
- [9] Pratama O. T. & Anandita, A. (2021). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterampilan Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017). *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 27–32. <https://doi.org/10.33319/jeko.v10i1.85>
- [10] Siregar, R. H. R., Nurlinda, & Indahwati, R. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(2), 218–227. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i2.6845>
- [11] Setiawina, N. D., & Evicahyani, S. I. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3).
- [12] Inge, I., Yunita, K., Muhsin, M., Rusliyawati, R., & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan dan Profesionalisme Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(2), 148–160. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i2.1281>
- [13] Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- [14] Ramadhani, M., Soerono, A. N. & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh SDM, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- [15] Taviana T., & Riharjo, I. B. (2020). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1), 1–23.
- [16] Ramadhan, M. Z., & Nurabiah, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD BPKAD Pemerintahan Kota Bima). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4284>
- [17] Sugiyono, S. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [18] Iacobucci, D., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & Bakamitsos, G. A. (2017). Mean centering, multicollinearity, and moderators in multiple regression: The reconciliation redux. *Behavior Research Methods*, 49(1), 403–404. <https://doi.org/10.3758/s13428-016-0827-9>
- [19] Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). Central limit theorem: The cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*, 70(2), 144–156. <https://doi.org/10.4097/kjae.2017.70.2.144>
- [20] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.) Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [21] Pakawaru, M. I. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu). *Jurnal Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 6(2), 1063–1073. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.20607>
- [22] Theana, V., Ardini, L., & Mildawati, T. (2025). Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Peran Moderasi Teknologi Informasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 319–341. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.26198>